



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renja OPD ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2023.

Dengan telah tersusunya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, semoga Renja OPD ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai target, Amien.

Purbalingga,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA,



ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Maksud dan Tujuan	3
4.1 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif)	39
BAB V. PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2023.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja DPMPTSP 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Selanjutnya Renja DPMPTSP 2023 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dimaksudkan :

1. Untuk menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perencanaan OPD setelah adanya anggaran kegiatan dan sub kegiatan.
2. Menggambarkan target capaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PADA TAHUN LALU

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Laporan hasil kinerja sepanjang tahun 2021 yang lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga untuk Pos Anggaran Belanja Langsung Pagu anggaran sebesar Rp. 3.827.901.190,00 terealisasi sebesar Rp.3.550.591.517,00 atau 92,76 % dari pagu anggaran sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp. 277.309.673,00 atau 7,24 %, adapum rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 3.143.021.290,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.008.599.215,00 (95,72 %) dengan efisiensi sebesar Rp 134.422.075,00 (4,28 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.545.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.495.000,00 (98,04 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 50.000,00 (1,96 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.665.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.615.000,00 (97,00 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 50.000,00 (3 %). Keluarannya berupa tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka dan rdppa).

a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 880.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 880.000,00 (100,00 %). Keluarannya berupa tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah. (LKJiP, LKPJ, LPPD, Lap. Aset, RB)

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.572.429.773,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.463.490.550,00 (95,77 %) dengan efisiensi sebesar

Rp. 108.939.223,00 (4,23%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.384.532.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.278.615.242,00 (95,56 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 105.916.242,00 (4,44 %). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN sejumlah 22 orang

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 59.344.658,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 58.946.558,00 (99,33 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 398.100,00 (0,67%). Keluarannya berupa terlaksananya administrasi tugas ASN

b.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 128.103.115,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 125.478.750,00 (97,95 %) dengan efisiensi sebesar Rp.2.624.365,00 (2,05%). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan dan operator komputer.

b.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp. 450.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 450.000,00 (100,00 %). Keluarannya berupa terlaksananya / tersusunya dokumen laporan keuangan / laporan realisasi anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 58.740.000,00 (97,90%) dengan efisiensi sebesar Rp. 1.260.000,00 (2,10%).

Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00. Realisasi fisik 96,88%, realisasi keuangan sebesar Rp. 38.750.000,00 (96,88 %). dengan efisiensi sebesar Rp.1.250.000,00 (3,13%). Keluarannya yaitu tersedianya pakaian dinas beserta atributnya bagi 31 pegawai DPMPTSP

c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 19.990.000,00 (99,95 %). dengan efisiensi sebesar

Rp.10.000,00 (0,05%). Keluarannya yaitu terlaksananya keikutsertaan 10 orang pegawai dalam pendidikan dan pelatihan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 132.978.517,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan Rp. 128.177.105,00 (96,39 %) dengan efisiensi sebesar Rp.4.801.412,00 (3,61 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

d.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.814.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.806.000,00 (99,56 %). dengan efisiensi sebesar Rp.8.000,00 (0,44%). Keluarannya yaitu tersedianya peralatan listrik, penerangan bangunan kantor

d.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 500.000,00 (100,00 %). Keluarannya yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

d.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 65.847.500,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 62.968.335,00 (95,63 %). dengan efisiensi sebesar Rp.2.879.165,00 (4,37%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan logisti kantor (bahan pembersih dan alat kebersihan, pengisian tabung gas, bibit tanaman dan BBM kendaraan dinas)

d.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran sebesar Rp. 34.369.794,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 32.795.000,00 (95,42 %). dengan efisiensi sebesar Rp.1.574.794,00 (4,58%). Keluarannya yaitu tersedianya jasa cetak dan penggandaan

d.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.140.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.140.000,00 (100,00 %). Keluarannya yaitu tersedianya bahan bacaan / koran , peraturan perundangan

d.6. Penyediaan Bahan / Material

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.554.948,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 20.412.095,00 (99,31 %). dengan efisiensi sebesar Rp.142.853,00 (0,69%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan habis pakai kebutuhan kantor (alat tulis kantor)

- d.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp. 8.752.275,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.555.675,00 (97,75 %). dengan efisiensi sebesar Rp.196.600,00 (2,25%). Keluarannya yaitu tersedianya jamuan tamu dan rapat.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Pagu anggaran sebesar Rp. 177.200.000,00 Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 170.794.695,00 (96,39 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 6.405.305,00 (3,61 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :
- e.1. Pengadaan Mebel
Pagu anggaran sebesar Rp. 14.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 14.000.000,00 (96,55 %). dengan efisiensi sebesar Rp.500.000,00 (3,45%). Keluarannya berupa tersedianya mebelair baru (meja kursi rapat).
- e.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu anggaran sebesar Rp. 162.700.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 156.794.695,00 (96,37 %). dengan efisiensi sebesar Rp.5.905.305,00 (3,63%). Keluarannya berupa tersedianya peralatan dan mesin kantor (komputer, mesin fax, scanner dll)
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Pagu anggaran sebesar Rp. 61.050.000,-. Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 52.298.230,00 (85,66 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 8.751.770,00 (14,34 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :
- f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu anggaran sebesar Rp. 550.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 462.500,00 (84,09 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 87.500,00 (15,91%). Keluarannya berupa perangko, materai dan jasa pos /pengiriman.
- f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp. 60.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 51.835.730,00 (85,68 %). dengan efisiensi sebesar Rp.8.664.270,00 (14,32%). Keluarannya berupa tersediainya daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 136.818.000,00 Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 132.603.635,00 (96,92 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 4.214.365,00 (3,08 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

- g.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pagu anggaran sebesar Rp. 44.606.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 44.232.235,00 (99,16 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 373.765,00 (0,84%). Keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) sebanyak 17 unit (5 kendaraan dinas roda empat dan 12 kendaraan dinas roda 2 (dua)

- g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.580.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.144.900,00 (94,93 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 435.100,00 (5,07%). Keluarannya berupa terpeliharanya peralatan kerja.

- g.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Pagu anggaran sebesar Rp. 83.632.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 80.226.500,00 (95,93 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 3.405.500,00 (4,07%). Keluarannya berupa terpeliharanya peralatan kerja.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 49.350.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 29.443.000,00 (59,66 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 19.907.000,00 (40,34 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 49.350.000,00 Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 29.443.000,00 (59,66%) dengan efisiensi sebesar Rp. 19.907.000,00 (40,34%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

- a.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00. Realisasi fisik nihil, realisasi keuangan sebesar Rp. 783.000,00 (3,80 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 19.817.000,00 (96,20%). Keluarannya nihil

a.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 28.750.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 28.660.000,00 (99,69 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 90.000,00 (0,31%).

Keluarannya Tersusunya buku profil investasi dan buku induk penanaman modal

3. Program Promosi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 45.270.500,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (99,40 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 270.500,00 (0,60 %).

Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 45.270.500,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (99,40 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 270.500,00 (0,60 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 45.270.500,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (99,40 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 270.500,00 (0,60 %). Keluarannya berupa Terlaksananya business gathering

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 177.997.400,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 146.821.941,00 (82,49 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 31.175.459,00 (17,51 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 177.997.400,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 146.821.941,00 (82,49 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 31.175.459,00 (17,51 %) Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pagu Anggaran sebesar Rp.88.297.400,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 84.943.206,00 (96,20 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.354.194,00 (3,80 %) Keluarannya terlaksananya sosialisasi perizinan

- a.2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
Pagu Anggaran sebesar Rp.67.800.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 41.468.000,00 (61,16 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.332.000,00 (38,84 %) Keluarannya jumlah obyek perijinan yang dipantau dan diawasi.
- a.3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
Pagu Anggaran sebesar Rp.21.900.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 20.410.735,00 (93,20 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.489.265,00 (6,80 %) Keluarannya tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Pagu anggaran sebesar Rp. 409.762.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 318.415.526,00 (71,71 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 91.346.474,00 (22,29 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 409.762.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 318.415.526,00 (71,71 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.91.346.474,00. (22,29 %) Program ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:
- a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 111.735.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 90.912.626,00 (81,36 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.20.822.374,00. (18,64 %) Keluarannya jumlah perusahaan yang dipantau dan jumlah buku laporan monev .
- a.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 260.164.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 227.502.900,00 (87,45 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.32.661.100,00. (12,55 %) Keluarannya jumlah Perusahaan yang dibina.

a.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.863.000,00. Realisasi fisik nihil, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 0,00 (0 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 37.863.000,00. (100,00 %) Keluarannya nihil disebabkan belum ada juknis yang baku tentang pengawasan penanaman modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.311.835,00 (92,47 %) dengan efisiensi sebesar Rp.188.165,00 (7,53 %).

Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 2.311.835,00 (92,47 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 188.165,00 (7,53 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 2.311.835,00 (92,47 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 188.165,00 (7,53 %). Keluarannya berupa jumlah dokumen yang diintegrasikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan promosi dilaksanakan dengan kegiatan melalui media cetak (spanduk) pada tiga titik di perbatasan antar kabupaten dan sosialisasi sosialisasi melalui business gathering, Pelaksanaan kegiatan promosi ini adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya kegiatan promosi ini juga membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Purbalingga untuk dipasarkan lebih luas ke luar Purbalingga.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosialisasi tentang perizinan dan

non perizinan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga secara bertahap. Jumlah investor yang telah menanamkan investasinya di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 3.629 investor dengan nilai realisasi investasinya sebesar Rp.1.462 milyar .

3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan dan non perizinan maka dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2021 perizinan yang dilakukan pengawasan sebanyak 31 izin perusahaan di tiap tribulan. Secara bertahap obyek pengawasan akan ditingkatkan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta meningkatkan realisasi investasi.
4. Melaksanakan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha atau pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 82,50 yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Baik atau bernilai B.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU S/D TAHUN 2021**

KABUPATEN PURBALINGGA

OPD	Kode	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	3	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	2	3	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2	18	BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
2	18	01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	71,35	70,60	71,32	71,32	100 %	71,35	71,35	100 %
2	18	01	01		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	7	7	7	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	01		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	18	01	01	07	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKP), LPPD, LKJIP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %
2	18	01	02		Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	02	01	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	02	02	Jumlah Kunjungan Lapangan / survey Koordinasi/ Undangan/ SPPD Dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, honor Operator Komputer	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	-	-	
2	18	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya LRA / LK / SPM	12 bulan	-	-	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA / LK / SPM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	-	-	-	-
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan barang milik daerah	Tersedianya administrasi asset milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	-	-	-	-
2	18	01	2	06	03	Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Tersedianya Peralataan Rumah Tangga	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	-	-	-	-
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	-	-	-	-
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	-	-	-	-
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
2	18	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	12 bulan	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %

2	18	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	07	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair baru	-	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	-	-	-	-	
2	18	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, Material dan Jasa Pos / Pengiriman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
-	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	100 %
2	18	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua, pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Score iklim Usaha	79,3	3,80	78,3	78,3	100 %	78,3	78,3	100 %	100 %	
2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	Ada	ada	ada	ada	100 %	ada	ada	ada	100 %	
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusnya Dokumen Regulasi Penanaman Modal	tersedia/ tidak tersedia	tersedia/ tidak tersedia	tersedia/ tidak tersedia	100 %	tersedia/ tidak tersedia	tersedia/ tidak tersedia	tersedia/ tidak tersedia	100 %	

2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusnya Evaluasi Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Usulan Kebijakan Lebih Lanjut	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	100 %
2	18	02	2	02	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	100 %	1 sektor	100 %
2	19	02	2	02	01	Peyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusnya dokumen rencana umum penanaman modal							
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terpetakan sampai dengan tahun N	5 sub sektor	5 sub sektor	5 sub sektor	5 sub sektor	100 %	1 sub sektor	100 %
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	2 investor	2 investor	2 investor	100 %	2 investor	2 investor	100 %
2	18	03	2	01	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	10 investor	10 investor	10 investor	100 %	10 investor	10 investor	100 %
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Ketersediaan dokumen kebijakan strategi Promosi Penanaman Modal	ada	ada	ada	100 %	2 kali	2 kali	100 %
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	0 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	3,90 point	3,90 point	3,90 point	100 %	3,90 point	3,95 point	100 %
2	18	04	2	01	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMP/TSP	124 jenis	124 jenis	124 jenis	100 %	124 jenis	124 jenis	100 %
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	124 jenis	124 jenis	124 jenis	100 %	124 jenis	124 jenis	100 %

2	18	04	2	01	02	Pemantauan dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Prosentase Dokumen Perizinan yang di Validasi	83 %	80 %	80 %	80 %	100 %	83 %	83 %	100 %	100 %
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengalihan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase (%) Penanganan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	83 Kali	80 Kali	80 Kali	80 Kali	100 %	83 Kali	83 Kali	100 %	100 %
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	95	85	85	85	100 %	95	95	100 %	100 %
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 PM	216 PM	216 PM	216 PM	100 %	216 PM	216 PM	100 %	100 %
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	100 %	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	100 %	100 %
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (jumlah perusahaan yang diwasi)	216 PM	216 PM	216 PM	216 PM	100 %	216 PM	216 PM	100 %	100 %
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (jumlah perusahaan yang diawasi)	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	100 %	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	100 %	100 %
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Up to date	23,39 %	6,50 %	9,68 %	9,68 %	100 %	23,39 %	23,39 %	100 %	100 %
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Yang Terintegrasi	23,39 %	6,50 %	9,68 %	9,68 %	100 %	23,39 %	23,39 %	100 %	100 %

2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data yang Terintegrasi	29 berkas	12 berkas	12 berkas	12 berkas	29 berkas	29 berkas	100 %	100 %
---	----	----	---	----	----	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan tugas ini karena adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2021, dapat kami uraikan analisis kinerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Adapun capaian indikator pada tahun 2021 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.A1.

Tabel Realisasi Investasi Baru/Pengembangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2016	483.271.000.000
2.	2017	547.076.000.000
3.	2018	622.870.314.578
4.	2019	679.695.974.162
5.	2020	758.271.424.434
6.	2021	1.462.142.613.812

Tabel 2.2.A2.

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2021.

No.	Nama Perusahaan
1	PT Royal Korindah
2	PT Boyang Industrial
3	PT Indokores Sahabat
4	PT Kesan Baru Sejahtera
5	PT Sung Chang Indonesia
6	PT Sung Shim International
7	PT Hasta Pustaka Sentosa
8	PT Yuro Mustika
9	PT Hanmi Hair International
10	PT Interwork Indonesia
11	PT Due Dream Interbational
12	PT Midas Indonesia
13	PT Milan Indonesia
14	PT Won Jin Indonesia
15	PT Ye Jin Beauty Ornament
16	PT Sophian Indonesia
17	PT Hyup Sung Indonesia
18	PT Victoria Beauty Industrial
19	PT Eye Rich
20	PT Chunil Indonesia
21	PT Inter Costech Indonesia
22	PT John Toys Indonesia
23	PT Nina Venus Indonesia
24	PT Universal Fishing Gear Solutions
25.	PT Buyoung Profesional Indonesia
26.	PT Sumber Graha Sejahtera

B. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.B1

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	10	11	9	380	2.517	-
2.	Izin Gangguan (HO)	772	619	-	-	-	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	641	922	652	655	780	322
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1.004	1.036	699	442	698	444
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB	1.016	1.046	706	717	2.517	2.302
6.	IUI/TDI	30	42	59	38	72	45
7.	Izin Reklame	913	512	388	463	285	1.026
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	146	87	90	67	466	196
9.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	22	7	2	1	6	-
10.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	15	11	10	16	-	-
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	51	36	14	10	7	10
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	1	-	-	14	8
13.	Izin Bidang Kesehatan	-	320	1.334	797	838	1.333
	JUMLAH	4.620	4.650	3.963	3.586	8.200	5.686

Adapun capaian indikator pada tahun 2021 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi dilaksanakan sebanyak 1 even dari target direnstra 2 evn, Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya pandemic covid 19, Pelaksanaan kegiatan promosi ini adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya even promosi ini juga membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Purbalingga untuk dipasarkan lebih luas ke luar Purbalingga.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor di Kabupaten Purbalingga, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga secara bertahap. Jumlah investor yang telah menanamkan investasinya di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021

sebanyak 3.252 investor dari target 802 investor dan dengan nilai realisasi investasinya sebesar Rp Rp1.462.142.613.812,-. (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 720.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh milyar rupiah), hal tersebut diperoleh dari pelaku usaha baru maupun pelaku usaha lama yang melakukan pengembangan.

3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan dan non perizinan maka dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan . Sepanjang tahun 2021 perizinan yang dilakukan pengawasan sebanyak 25 izin dari target sebanyak 21 izin perusahaan di tiap tribulan . Secara bertahap obyek pengawasan akan ditingkatkan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta meningkatkan realisasi investasi.
4. Pelaksanaan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha atau pengguna layanan, dimana hasil penilaian tersebut menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparaturn pemerintah, khususnya aparaturn pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 85,53 dari target 82,25 yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Baik atau bernilai B.

TABEL 2.2.

REKAPITULASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
L	URUSAN PENANAMAN MODAL													
a.	Program Promosi, Pemasaran Potensi, dan Fasilitasi Investasi													
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)			750	800	850	900	2.782	3226	850	900			
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)			2	2	2	2	12	26	2	2			
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)			50.000.000	700.000.000	793.000.000	886.000.000	739.279.884	1.208.249.784.309	793.000.000	886.000.000			
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)			0.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.991.540	253.892.829.502	20.000.000	20.000.000			
5	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)			670.000.000	720.000.000	813.000.000	906.000.000	758.271.424	1.462.142.613.812	813.000.000	906.000.000			
b.	Program Pelayanan Penanaman Modal													
240	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perijinan			82,00	82,25	82,30	82,30	82,50	85,53	82,30	82,30			
241	Rata-rata jangka waktu proses perijinan			4,6	4,2	3	3	2	2	3	3			
242	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)			50	124	124	124	50	50	124	124			

3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Daerah mencakup:
 1. Belum diterbitkannya peraturan/ ketentuan tatacara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah;
 2. Terhambatnya investasi karena lahan diperuntukan industri dan infrastruktur pendukung kurang menarik bagi calon penanam modal;
 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanaman modal.

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal
 1. Belum adanya dokumen strategi promosi Penanaman Modal;
 2. Arah kebijakan potensi dan peluang investasi masih berada di tiap OPD, belum menjadi kebijakan di tingkat Kabupaten;
 3. Belum optimalnya promosi dikarenakan keterbatasan anggaran dan cakupan media promosi.

- c. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penanaman Modal :
 1. Belum maksimalnya pencatatan realisasi investasi berbasis LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) karena kesadaran dan keterbatasan SDM pelaku usaha;
 2. Belum optimalnya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.

- d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 1. Masih belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 2. Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal;
 3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

- e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - 1. Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
 - 2. Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.

- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
 - 1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - 2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Program prioritas pembangunan daerah memuat program - program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 18	PENANAMAN MODAL				4.142.982.000	PENANAMAN MODAL				4.430.025.000	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.094.521.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.470.014.000	
2 18 01 2 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	11.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	11.000.000	
2 18 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen RKA dan Renja	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen RKA dan Renja	2 dokumen	6.000.000	
2 18 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJIP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun.	5 dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJIP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun	5 dokumen	5.000.000	

2	18	01	2	02	02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	2.663.336.000	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	2.798.329.000
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	12 bulan	2.549.367.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	12 bulan	2.664.350.000
2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanannya Dinas Luar Daerah	12 bulan	59.344.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanannya Dinas Luar Daerah	12 bulan	59.344.000
2	18	01	2	02	03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Tersusunnya LRA / LK /SPM	12 bulan	54.625.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Purbalingga	Tersusunnya LRA / LK /SPM	12 bulan	54.625.000
2	18	01	2	03	03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milk daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milk daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan barang milk daerah SKPD	Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi asset milk daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000	Penatausahaan barang milk daerah SKPD	Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi asset milk daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 persen	20.000.000
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	20.000.000
2	18	01	2	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	12 bulan	72.697.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	12 bulan	112.197.000

2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Tersedianya Perangkat Listrik	12 bulan	1.814.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Tersedianya Perangkat Listrik	12 bulan	1.814.000
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	51.983.0000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	91.483.000
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Purbalingga	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	12 buln	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Purbalingga	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	12 buln	2.400.000
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Purbalingga	Jumlah Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	12 bulan	10.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Purbalingga	Jumlah Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	12 bulan	10.500.000
2	18	01	2	06	11	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Purbalingga	Tersedianya system pemerintah berbasis elektronik	12 bulan	6.000.000	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Purbalingga	Tersedianya system pemerintah berbasis elektronik	12 bulan	6.000.000
2	18	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	253.550.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	349.550.000
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Tersedianya Perangkat, Materai dan Jasa Pos / Pengiriman	12 Bulan	550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Tersedianya Perangkat, Materai dan Jasa Pos / Pengiriman	12 Bulan	550.000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	60.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	156.500.000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perangkat Kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perangkat Kantor	9 stel	4.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perangkat Kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perangkat Kantor	9 stel	4.500.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Tersedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	188.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Tersedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	188.000.000

2	18	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	87.938.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	172.938.000
2	18	01	2	09 D2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	12 Bulan	71.858.000	Purbalingga	Purbalingga	12 Bulan	91.858.000
2	18	01	2	09 D6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	8.580.000	Purbalingga	Purbalingga	12 Bulan	38.580.000
2	18	01	2	09 D9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	7500.000	Purbalingga	Purbalingga	12 Bulan	42.500.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Scor Iklim Usaha	80 point	38.100.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Score Iklim Usaha	80 point	38.100.000
2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000
2	18	02	2	01 D1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	15.600.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	15.600.000
2	18	02	2	01 D2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunya laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dan usulan kebijakan lebih lanjut	86 persen	5.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunya laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dan usulan kebijakan lebih lanjut	86 persen	5.000.000

2	18	02	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terpetakan Potensi dan Peluang usaha	17.500.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terpetakan Potensi dan Peluang usaha	17.500.000
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RUPM	8.750.000	Jumlah dokumen RUPM	8.750.000
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Investasi dan Buku Induk Penanaman Modal Kajian dan Raperda Terkait Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	60 buku	60 buku	8.750.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	49.495.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	49.495.000
2	18	03	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang melakukan orientasi	49.495.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang melakukan orientasi	49.495.000
2	18	03	2	01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan kebijakan promosi penanaman modal	8.750.000	Penyusunan kebijakan promosi penanaman modal	8.750.000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal (Pameran dan Business Gathering)	40.745.000	Jumlah Pameran dan Business Gathering	40.745.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek pelayanan public bidang Investasi	547.115.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek pelayanan public bidang Investasi	488.665.000

2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani di DPMP-TSP	124 jenis	547.115.000	124 jenis	86 persen	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMP-TSP	124 jenis	438.100.000	124 jenis	458.665.000
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMP-TSP	124 jenis	526.550.000	124 jenis	86 persen	Purbalingga	Pembinaan dan Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan	100 persen	6.000.000	6.000.000	
2	18	04	2	01	02	Pemantauan dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Prosentase dokumen perizinan yang divalidasi	86 persen	6.000.000	86 persen	100 persen	Purbalingga	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 persen	6.975.000	6.975.000	
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase penanganan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	100 persen	6.975.000	100 persen	86 kali	Purbalingga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	86 kali	7.590.000	7.590.000	
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	105 perush.	397.601.000	105 perush.	216 perush.	Purbalingga	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	105 perush.	397.601.000	397.601.000	
2	18	05	2	01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 perush.	397.601.000	216 perush.		Purbalingga	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	216 perush.	397.601.000	397.601.000	

2	18	05	2	01	D1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali	118.274.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali	46.865.000
2	18	05	2	01	D2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	216 perush	242.464.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	216 perush	317.636.000
2	18	05	2	01	D3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	13 kali.	36.863.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	13 kali.	33.100.000
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersaji Secara Update	34,68 persen	16.150.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersaji Secara Update	34,68 persen	16.150.000
2	18	06	2	01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase data yang terintegrasi	34,68 persen	16.150.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase data yang terintegrasi	34,68 persen	16.150.000
2	18	06	2	01	D1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Jumlah Data yang terintegrasi	43 dokumen	16.150.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Jumlah Data yang terintegrasi	43 dokumen	16.150.000

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Usulan program kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah.

Usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga merupakan program kegiatan dan sub kegiatan yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, hal tersebut dikarenakan tidak adanya usulan dari masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **"Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia"**.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi*, dengan sasaran *Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan*.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya investasi daerah.***

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :
"Meningkatnya daya tarik investasi di daerah dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan"

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Pada tahun 2023
1		Pertumbuhan Nilai Investasi	11,44
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	906.000.000.000,00
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Nilai SAKIP	71,37

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel 3.1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun (Rp. Juta)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya investasi daerah		pertumbuhan nilai Investasi	7,46	12,92	11,44	10,38	9,30	9,79
		Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	720.000	813.000	906.000	1.000.000	1.093.000	1.200.000
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPPTSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	71,32	71,35	71,37	71,37	71,40	71,40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Memuat Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif)

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat melalui usulan rincian anggarannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Usulan Anggaran	+/-
		2022	2023	
	Belanja	4.142.982.000,-	4.430.025.000,-	287.043.000,-
	- Langsung	4.142.982.000,-	4.430.025.000,-	287.043.000,-

Secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2022

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	keg	3.094.521.000
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	keg	38.100.000
3.	Program Promosi Penanaman Modal	1	keg	49.495.000
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	keg	547.115.000
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	keg	397.601.000
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	keg	16.150.000
Jumlah		12	keg	4.142.982.000

Adapun Program kegiatan Tahun 2023 terdiri atas :

- I) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 kegiatan sebagai berikut;
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Tersusunya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
dengan 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan
Indikator : Tersusunya dokumen renja, rka.
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator : Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, LPPD, LKjIP, Laporan Aset, RB) yang tersusun.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : Terlaksananya administrasi keuangan kantor
dengan 3 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Indikator : Jumlah ASN, yang gaji dan tunjanganya terbayar tepat waktu.
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Indikator : Jumlah kunjungan lapangan / survey / koordinasi / undangan / SPPD dalam daerah dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator : Tersusunya LRA / LK / SPM
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator
dengan 1 sub kegiatan
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Indikator : Tersedianya admnistrasi aset milik daerah
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 1 sub kegiatan
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator : Rata - rata capaian SKP
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Terlaksananya administrasi umum
dengan 5 sub kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
Indikator : Tersedianya perlengkapan listrik
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
Indikator : Tersedianya bahan logistik kantor.
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator : Tersedianya bahan bacaan (koran, peraturan perundang-undangan)
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator : Tersedianya jamuan tamu dan rapat.
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
Indikator : Tersedianya sistem pemerintah berbasis elektronik.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan 4 sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Indikator : Tersedianya pelayanan umum kantor
 - b. Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator : Tersedianya perangko, materai dan jasa pos/pengiriman.
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator : Tersedianya daya listrik, air pam, jasa telekomunikasi
 - d. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator : Terpeliharanya barang milik daerah.
dengan 3 sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator : Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, suku cadang dll)
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
Indikator : Terpeliharanya peralatan kerja.
 - c. Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya.
Indikator : Terpeliharanya gedung kantor(pengecatan dll), terpeliharanya peralatan gedung kantor

ii) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan 2 kegiatan sebagai berikut;

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota . .

Indikator : Prosentase ketersediaan dokumen evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

dengan 2 sub kegiatan :

a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal

Indikator : Jumlah dokumen kajian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

b. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

Indikator : Tersusunya laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dan usulan kebijakan lebih lanjut.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah sektor usaha terpetakan potensi dan peluang investasi

dengan 2 sub kegiatan :

a. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota

Indikator : Jumlah dokumen RUPM

b. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota

Indikator : Tersedianya buku profil investasi dan penanaman modal dan buku induk penanaman modal.

III) Program Promosi Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah investor yang melakukan orientasi investasi

dengan 2 sub kegiatan :

a. Menyusun strategi promosi penanaman modal

Indikator : Penyusunan kebijakan promosi penanaman modal

b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota

indikator : Jumlah kegiatan promosi penanaman modal

IV) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani di DPMPTSP dengan 4 sub kegiatan :

- a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator : Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik

- b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Indikator : Persentase dokumen perizinan yang di validasi

- c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Indikator : Persentase penanganan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat

- d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah

Indikator : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah.

V) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM).

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

Indikator : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal

Indikator : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal (jumlah perusahaan yang dibina)

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Indikator : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal .

VI) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase data yang terintegrasi

dengan 1 sub kegiatan :

a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator : Jumlah dokumen pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tabel 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2			4	5	6	7	8	9	10
2 18	PENANAMAN MODAL				4.430.025.000				4.564.243.000
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti		100 %	3.470.014.000		Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.604.232.000
2 18 01 2 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	11.000.000		Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100 %	11.000.000
2 18 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan Renja	Purbalingga	2 dokumen	6.000.000	APBD	Tersusunnya dokumen perencanaannya (RKA, Renja)	2 dokumen	6.000.000
2 18 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun	Purbalingga	5 dokumen	5.000.000	APBD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun	5 dokumen	5.000.000
2 18 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan		12 bulan	2.796.329.000		Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	2.932.547.000
2 18 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayar Tepat Waktu	Purbalingga	20 ASN	2.694.360.000	APBD	Tersedianya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	20 ASN	2.818.578.000
2 18 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan Lapangan/ Survey/ Koordinasi/Undangan/ SPPO dalam Daerah dan Tersedianya Perijinan Dinas Luar Daerah	Purbalingga	12 bulan	59.344.000	APBD	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	59.344.000

2	18	01	2	02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersusunya LRA / LK / SPM	Purbalingga	12 bulan	54.625.000	APBD	Tersusunya LRA / LK / SPM	12 bulan	54.625.000
2	18	01	2	03	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Purbalingga	100 persen	6.000.000	APBD	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Purbalingga	100 persen	6.000.000	APBD	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purbalingga	100 persen	20.000.000	APBD	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 persen	20.000.000
2	18	01	2	05	08	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purbalingga	10 orang	20.000.000	APBD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	20.000.000
2	18	01	2	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Purbalingga	12 bulan	112.197.000	APBD	Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	12 bulan	112.197.000
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya Perengkapan Listrik	Purbalingga	12 bulan	1.814.000	APBD	Jumlah Tersedianya Perengkapan Listrik	12 bulan	1.814.000
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	12 bulan	91.483.000	APBD	Tersedianya BBM, isi tabung gas, erobot kantor	12 bulan	91.483.000
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya jumlah bulan Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	Purbalingga	12 buln	2.400.000	APBD	Tersedianya bahan bacaan (Langganan suara merdeka)	12 bulh	2.400.000
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Jumlah Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	Purbalingga	12 bulan	10.500.000	APBD	Tersedianya jamuan makan minum tamu dan rapat	12 bulan	10.500.000
2	18	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tersedianya system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	12 bulan	6.000.000	APBD	tersedianya system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 bulan	6.000.000
2	18	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	12 bulan	349.550.000	APBD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	349.550.000
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi, perangkat dan benda pos lainnya	Purbalingga	12 Bulan	550.000	APBD	Tersedianya materi, perangkat dan benda pos lainnya.	12 Bulan	550.000

2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	Purbalingga	12 Bulan	156.500.000	APBD	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	156.500.000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Purbalingga	9 stel	4.500.000	APBD	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	9 stel	4.500.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	12 bulan	188.000.000	APBD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	188.000.000
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		12 Bulan	172.938.000		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	172.938.000
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Purbalingga	12 Bulan	91.858.000	APBD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	12 Bulan	91.858.000
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Purbalingga	12 Bulan	38.580.000	APBD	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	38.580.000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan dll)	Purbalingga	12 Bulan	42.500.000	APBD	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan dll)	12 Bulan	42.500.000
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Score iklim usaha		80 point	38.100.000		Score iklim usaha	80 point	38.100.000
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		100 %	20.600.000		Prosentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	1 dokumen	15.600.000	APBD	Tersedianya Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	15.600.000
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya laporan evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	Purbalingga	86 persen	5.000.000	APBD	Tersusunnya laporan evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	86 persen	5.000.000

2	18	02	2	02	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terpetaan Potensi dan Peluang usaha	17.500.000	17.500.000	Jumlah Sektor Usaha Terpetaan Potensi dan Peluang usaha	17.500.000	1	dokumen	1	17.500.000
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	8.750.000	8.750.000	Jumlah dokumen RUPM	8.750.000	1	dokumen	1	8.750.000
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Investasi dan Buku Induk Kajian dan Raperda Terkait Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.750.000	8.750.000	Tersedianya Buku Profil Investasi dan Buku Induk Penanaman Modal Kajian dan Raperda Terkait Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.750.000	60	buku	60	8.750.000
2	18	03	03	03	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investor	49.495.000	49.495.000	Jumlah Kepeminatan Investor	49.495.000	3	Investor	3	49.495.000
2	18	03	2	01	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi	49.495.000	49.495.000	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi	49.495.000	10	investor	10	49.495.000
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan promosi penanaman modal	8.750.000	8.750.000	Penyusunan kebijakan promosi penanaman modal	8.750.000	ada	ada	ada	8.750.000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal (Pameran dan Business Gathering)	40.745.000	40.745.000	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal (Pameran dan Business Gathering)	40.745.000	3	jenis	3	40.745.000
2	18	04	04	04	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	458.665.000	458.665.000	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	458.665.000	4	(point)	4	458.665.000
2	18	04	2	01	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMP/TSP	458.665.000	458.665.000	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMP/TSP	458.665.000	124	jenis	124	458.665.000
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	438.100.000	438.100.000	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	438.100.000	124	jenis	124	438.100.000

2	18	04	2	01	02	Pemantauan dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase dokumen perizinan yang divalidasi	Purbalingga	86 persen	6.000.000	APBD	Persentase dokumen perizinan yang divalidasi	86 persen	6.000.000
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Persentase penanganan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Purbalingga	100 persen	6.975.000	APBD	Persentase penanganan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	100 persen	6.975.000
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	Purbalingga	86 kali	7.590.000	APBD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	86 kali	7.590.000
2	18	05	2	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		105 perush.	397.601.000		Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	105 perush.	397.601.000
2	18	05	2	01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		216 perush	397.601.000		Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 perush.	397.601.000
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	7 kali.	46.865.000	DAK/APBD	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali.	46.865.000
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	218 perush	317.636.000	DAK	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	218 perush.	317.636.000
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	13 kali	33.100.000	DAK	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13 kali	33.100.000
2	18	06	2	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update		34,68 persen	16.150.000		Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update	34,68 persen	16.150.000

2	18	06	2	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Yang Terintegrasi:	34,68 Persen	16.150.000	Persentase Data Yang Terintegrasi:	34,68 Persen	16.150.000
2	18	06	2	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Yang Terintegrasi	43 dokumen	16.150.000	Jumlah Data Yang Terintegrasi:	43 dokumen	16.150.000
						Purbalingga			APBD		

RENCANA KERJA TAHUN 2023
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 PURBALINGGA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Pertumbuhan Nilai Investasi	11,44
Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi	906.000.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPPTSP	Nilai SAKIP	71,37

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dipastikan mempedomani Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 - 2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah

meningkatnya daya tarik investasi di daerah dan meningkatnya kualitas kelembagaan atas pelayanan perizinan dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



PEMERINTAH KABUPATEN
DPMPTSP
PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001